

TATA KELOLA EKONOMI GLOBAL (STUDI KASUS: KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID19 DI INDONESIA)

Febri Puja Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik. Universitas Negeri Yogyakarta

febripuja.2024@student.uny.ac.id

Abstract

This study examines the role of international organizations in mitigating the economic crisis in Indonesia triggered by the COVID-19 pandemic. The research analyzes the impact of the pandemic on Indonesia's economy, including job losses, currency devaluation, and GDP contraction. It then delves into the responses of key international organizations such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and the Group of Twenty (G20) in supporting Indonesia's economic recovery. The findings reveal that these organizations played a crucial role through various mechanisms, including financial assistance, policy advice, and fostering global cooperation. The IMF provided emergency funding and technical assistance, while the World Bank supported infrastructure development and social safety nets. The G20 facilitated coordination among major economies and promoted a global response to the crisis. Moreover, the study underscores the importance of Indonesia's active participation in these international forums. By leveraging its presidency of the G20 in 2022, Indonesia was able to shape the global agenda and attract foreign investment.

Keywords: COVID-19, Indonesia, economic crisis, international organizations, global cooperation, economic recovery.

Abstrak

Studi ini mengkaji peran organisasi internasional dalam memitigasi krisis ekonomi di Indonesia yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Penelitian ini menganalisis dampak pandemi terhadap ekonomi Indonesia, termasuk hilangnya lapangan kerja, devaluasi mata uang, dan kontraksi PDB. Kemudian, penelitian ini mengkaji respons organisasi internasional utama seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Kelompok Dua Puluh (G20) dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi ini memainkan peran penting melalui berbagai mekanisme, termasuk bantuan keuangan, saran kebijakan, dan pembinaan kerja sama global. IMF menyediakan dana darurat dan bantuan teknis, sementara Bank Dunia mendukung pembangunan infrastruktur dan jaring pengaman sosial. G20 memfasilitasi koordinasi di antara negaranegara ekonomi utama dan mendorong respons global terhadap krisis. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional ini. Dengan

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

memanfaatkan kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022, Indonesia mampu membentuk agenda global dan menarik investasi asing.

Kata kunci: COVID-19, Indonesia, krisis ekonomi, organisasi internasional, kerja sama global, pemulihan ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Tata kelola ekonomi global adalah sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi antara negara-negara, lembaga-lembaga internasional, serta sektor swasta dalam rangka mengelola isu-isu ekonomi lintas batas. Sistem ini sangat penting karena memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun kolaborasi dan integrasi ekonomi antarnegara semakin meningkat, tata kelola ini tetap menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, seiring perubahan kondisi geopolitik, sosial, dan teknologi global. Salah satu tantangan besar yang telah mengubah lanskap tata kelola ekonomi global adalah Krisis Keuangan Global 2008, yang mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem regulasi keuangan internasional dan memaksa dunia untuk melakukan perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor keuangan global (Stiglitz, 2010). Krisis ini menyoroti pentingnya peran lembaga-lembaga internasional, seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia, serta forum-forum ekonomi global seperti G20, dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

Pasca Krisis Keuangan Global, IMF dan Bank Dunia melakukan serangkaian reformasi untuk memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan di sektor keuangan internasional. IMF, misalnya, telah memperkuat perannya sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan ekonomi makro negara-negara anggotanya dengan memberikan rekomendasi serta bantuan finansial kepada negara yang mengalami krisis keuangan. Selain itu, peran IMF dalam mengelola kebijakan moneter global semakin vital mengingat ketergantungan yang meningkat antara negara-negara dalam sistem ekonomi yang semakin terintegrasi. Bank Dunia, di sisi lain, fokus pada penyediaan dana pembangunan bagi negara-negara berkembang untuk membantu mereka meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Krugman, 2009).

Krisis Keuangan 2008 juga mempercepat perubahan kekuatan ekonomi dunia, dengan munculnya negara-negara seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), yang semakin memainkan peran penting dalam perekonomian global. Negara-negara ini menentang dominasi negara maju dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan negara (*mercantilism*), dibandingkan dengan ekonomi liberal yang mendasarkan diri pada perdagangan bebas dan pasar terbuka (Rodrik, 2011). Pergeseran ini mencerminkan kekuatan ekonomi yang kini lebih terdistribusi dari negara-negara Barat menuju negara-negara berkembang yang semakin memegang pengaruh besar dalam perekonomian global, baik dalam bidang perdagangan, investasi, maupun kebijakan moneter.

Di tengah dinamika ini, berbagai organisasi internasional berperan penting dalam mengelola aspek-aspek spesifik tata kelola ekonomi global. Selain IMF, Bank Dunia, dan WTO, terdapat organisasi lain seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang fokus pada pengembangan kebijakan ekonomi dan sosial global, *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yang mengatur standar penerbangan internasional, *International Organization for Standardization* (ISO) yang menetapkan standar global dalam berbagai sektor, serta *International Air Transport Association* (IATA) yang memfasilitasi kerja sama di industri penerbangan internasional. Peran organisasi-organisasi ini sangat relevan dalam mendukung stabilitas, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi global.

Gerakan ini, yang dipimpin oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, menuntut agar ekonomi global tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada distribusi yang adil dan ramah lingkungan. Salah satu kritik utama terhadap globalisasi adalah kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan dan ketimpangan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan yang berorientasi pada pasar bebas. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional mulai mengarah pada konsep keberlanjutan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif, seperti yang ditekankan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang digagas oleh PBB.

Dalam konteks Indonesia, peran lembaga-lembaga internasional sangat signifikan, terutama dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas perekonomiannya, terutama setelah resesi ekonomi global yang dipicu oleh pandemi. Pemerintah Indonesia perlu merespons dengan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan sosial yang semakin dalam (Bappenas, 2020). Pemulihan ekonomi ini tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi memerlukan koordinasi erat dengan negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan G20.

Tata kelola ekonomi global yang efektif sangat bergantung pada kerjasama antarnegara dan lembaga-lembaga internasional dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini dalam konteks global dan regional yang lebih luas. Berdasarkan teori-teori ekonomi global yang ada, penting untuk melihat hubungan antara kebijakan ekonomi domestik dan dinamika ekonomi global, serta bagaimana kolaborasi antar negara dan organisasi internasional dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola ekonomi global berperan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, dengan fokus pada dampaknya terhadap krisis ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengulas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis, serta peran organisasi internasional dalam mendukung pemulihan ekonomi. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya tata kelola ekonomi yang tangguh dan kolaboratif dalam menghadapi krisis di masa depan.

B. ISU EKONOMI

Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah mengadakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membawa dampak buruk pada pembatasan mobilitas masyarakat salah satunya aktivitas perekonomian. Menurunnya mobilitas perekonomian ini membawa Indonesia pada permasalahan lain yang lebih serius yaitu munculnya krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada era Covid-19 menjadi polemik yang sangat serius karena secara tidak langsung nantinya akan berpengaruh pada roda perekonomian dunia. Pada masa krisis ini, berbagai macam sektor usaha di bidang perdagangan mengalami kendala yang cukup besar dalam operasional sehingga banyak pekerja yang mengalami PHK sebagai imbas dari merebaknya virus covid19. Berdasarkan data yang diperoleh melalui satu data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tercatat terdapat sekitar 2.175.928 pekerja yang terdampak Covid-19. Berdasarkan data tersebut, pekerja yang mengalami imbas dari covid-19 dibagi menjadi 3 kelompok antara lain pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan tempat bekerja, pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal/kehilangan usaha/mengalami kebangkrutan.

Tabel 1. Pendataan Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 per Tanggal 30 Agustus 2020

No.	Kelompok Pekerja Terdampak	Jumlah
1	PHK	137.034
2	Dirumahkan	1.155.630
3	Informal/Bangkrut/Kehilangan Usaha	633.421
TOTAL		2.175.928

Sumber: Satu Data Kemnaker (2020)

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang kian memprihatinkan tersebut seiring dengan permasalahan ekonomi lainnya yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Selama berlangsungnya pandemi Covid-19 pada 2 Maret sampai 30 September 2020 dinyatakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mengalami penyusutan dari awalnya pada 2,75% berubah menjadi 4,57%. Sebelum terjadinya fenomena ini, nilai tukar rupiah pada bulan Januari hingga Februari sempat pada angka Rp 13.572 sampai 14.34\$. Penurunan mulai terjadi pada pertengahan Bulan Maret hingga pada akhir bulan Mei dengan perkiraan pada Rp 14.000 sampai 16.600\$. Kemudian pada awal bulan Juni hingga akhir September kurs rupiah terhadap dollar AS mulai terhubung kembali dengan perkiraan Rp. 13.870 sampai 14.900\$.

Fenomena melemahnya nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat impor produk pada saat pandemi. Hal tersebut disebabkan pada saat merebaknya pandemi Covid-19, masyarakat cenderung mengadakan transaksi pembelian melalui *online*. Transaksi secara *online* tersebut memungkinkan munculnya banyak barang impor melalui proses transaksi tersebut. Peningkatan jumlah barang impor ini tentunya akan berdampak pada melemahnya kurs rupiah. Selain itu, faktor lain dipengaruhi oleh pendapatan nasional yang menurun. Pada masa pandemi, banyak pekerja yang terdampak mulai dari PHK, pekerja yang dirumahkan, serta para pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan pendapatan nasional sehingga berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin terdepresiasi. Maka tingginya tingkat tekanan pada perekonomian di Indonesia berpengaruh pada penurunan perekonomian domestik yang ditandai dengan lemahnya kurs rupiah terhadap dollar AS.

Pada krisis ini, APBN mendapatkan beban yang cukup berat dalam mendanai sektor kesehatan yang pada saat itu menjadi sektor yang paling terdampak setelah sektor perekonomian. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh *World Bank* dan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) menyatakan bahwa tingkat perekonomian Indonesia selama tahun 2020 diperkirakan tidak akan mengalami pertumbuhan atau mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 0%. Sedangkan berdasarkan hasil prediksi yang dilakukan oleh IMF (*International Monetary Fund*) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar -0,5%. Sementara itu berdasarkan analisis data statistik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif. BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan perekonomian Indonesia pada kuartal IV Tahun 2020 mengalami reduksi sebesar -2,19%. Reduksi atau kontraksi perekonomian ini terjadi berturut-turut dalam tiga kuartal. Berdasarkan hal tersebut maka dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia mengalami krisis yang serius.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV- 2020

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Dalam mengurai krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada masa pandemi Covid-19 diperlukan peran pemerintah dalam menyusun kebijakan serta strategi yang tepat untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang turut berpengaruh dalam perekonomian Internasional melalui konsumsi jumlah penduduk yang cukup tinggi, tentunya dalam menyelesaikan krisis perekonomian ini pemerintah tidak sendiri, diperlukan juga upaya kerja sama melalui organisasi-organisasi dunia baik itu organisasi Internasional maupun regional. Kontribusi melalui organisasi internasional maupun regional tersebut diharapkan mampu menciptakan kebijakan dan bantuan guna mencapai kesetimbangan perekonomian dari masa krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Organisasi Internasional dalam Krisis Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

1. *International Monetary Fund (IMF)*

IMF merupakan organisasi internasional yang bergerak pada bidang keuangan dan memberikan bantuan berupa pinjaman dana kepada negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 melalui konferensi *Bretton Woods* dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi global, memperbaiki neraca perdagangan, meningkatkan perdagangan internasional, serta menekan angka kemiskinan. Setiap negara yang sudah tergabung di dalam IMF ini wajib untuk menyumbangkan dana cadangan kepada IMF dengan sistem kuota tertentu. Di mana nantinya dana cadangan tersebut dapat untuk digunakan oleh negara yang sedang berada dalam kesulitan pada neraca pembayarannya.

Sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi global, IMF melakukan perannya dalam mencegah terjadinya resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, salah satunya di Indonesia. Stabilitas ekonomi ini sangat penting dilakukan karena dengan stabilnya perekonomian maka lembaga-lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. IMF memberikan tanggapan atas resesi ekonomi tersebut dengan menjalankan fungsi utamanya, yaitu melakukan pemantauan perkembangan dan kebijakan ekonomi (*Surveillance*) di Indonesia pada tahun 2020 dan memberikan fasilitas peminjaman dana (*Lending Facilities*) pada tahun 2021.

• *Surveillance* IMF Pada Indonesia Tahun 2020

Secara umum, kegiatan *surveillance* meliputi *monitoring*, tukar pandangan dan informasi, serta melakukan *peer pressure* kepada kebijakan pribadi negara yang dapat berdampak negatif kepada kawasan. Dalam *surveillance* ini, kegiatan *monitoring* dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan atau justru terjadi penyimpangan. Dalam mengefektifkan kegiatan *monitoring*, dilakukan kegiatan bertukar pandangan dan informasi atau *policy dialogue*. Di mana dalam kegiatan ini pula

diadakan *peer pressure* untuk membantu negara anggota dalam mengimplementasikan rekomendasi kebijakan. Adapun rekomendasi dari IMF kepada Indonesia untuk menghindari resesi ekonomi akibat Covid-19 pada tahun 2020, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan investasi publik dan fleksibilitas relokasi anggaran guna mendorong pemulihan ekonomi.
2. Kembali ke aturan fiskal, yakni menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang dengan mengembalikan pagu anggaran 3% dari PDB pada tahun 2023. Melalui penyusunan strategi fiskal jangka menengah yang mencakup langkah-langkah peningkatan pendapatan untuk mendukung rencana tersebut.
3. Mendukung perekonomian melalui kebijakan moneter yang fleksibel, yaitu dengan mempertahankan suku bunga rendah dan membatasi pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI) hanya sebagai upaya terakhir untuk mengelola risiko pembiayaan anggaran.
4. Pelonggaran aturan klasifikasi kredit dan langkah tambahan untuk mendorong kredit sektor swasta untuk mengantisipasi penurunan kualitas aset.
5. Reformasi struktural yang berfokus pada pendalaman keuangan, digitalisasi, dan strategi peningkatan pendapatan pajak harus terus diperkuat.

• *Lending Facilities* Pada Tahun 2021

Lending facilities ini berupa bantuan pinjaman dana dan juga dukungan proses penyesuaian dan kebijakan reformasi terkait dengan permasalahan ekonomi struktural yang diberikan oleh IMF kepada negara anggotanya yang memiliki masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali cadangan devisa, mengembalikan stabilitas nilai tukar, dan mendorong kembali pertumbuhan perekonomian pada negara tersebut.

Lending facilities dari IMF pada tahun 2021 ini berupa alokasi umum *Special Drawing Right* (SDR) yang setara dengan kurang lebih 650 US Dollar (SDR 456 Miliar), bertujuan untuk meningkatkan likuiditas global yang akan dialokasikan kepada negara-negara anggota yang memiliki hak dalam Departemen Hak Penarikan Khusus secara proporsional sesuai dengan kuota yang tersedia. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki hak suara sebesar 0.96%. Dari hal tersebut, Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman keuangan sebanyak SDR 4.46 Miliar atau setara dengan RP90, 2 Triliun rupiah.

Member Country	Existing Commitment NDR Allocation	General SDR Allocation 1 (Effective August 22)	Cumulative SDR Allocation 2 (as of August 22)
Algeria	540,719,817	227,025,282	767,745,102
Angola	25,768,081	55,815,553	81,583,634
Argentina	1,432,286,286	201,259,837	1,633,546,123
Australia	10,885,168,872	25,027,874,827	35,913,043,699
Austria	852,489,277	127,259,259	979,748,536
Bahrain	782,287,246	2,227,286,411	3,009,573,657
Belgium	11,185,157	15,713,822	26,898,979
Brazil	202,611,458	415,768,824	618,380,282
Canada	152,488,808	328,321,168	480,810,000
Chile	14,445,757	27,255,155	41,699,912
China	87,888,271	174,247,124	262,135,455
China, P.R.	123,849,878	258,422,085	382,271,963
Colombia	945,257,276	1,258,252,158	2,203,509,434
Czechia	117,156,436	308,430,627	425,587,063
Denmark	2,875,126,127	2,425,522,245	5,300,648,372
Egypt	1,432,286,286	2,425,522,245	3,857,808,531
Ecuador	1,134,438,328	1,134,438,328	2,268,876,656
Egypt	775,227,027	1,134,438,328	1,909,665,355
France	885,585,541	1,134,438,328	2,020,023,869
Germany	8,575,111,755	14,445,757	14,454,287,512
Greece	782,287,246	1,134,438,328	1,916,725,574
India	101,588,888,888	1,134,438,328	102,723,327,216
Indonesia	123,849,878	1,134,438,328	1,258,252,158
Iran, Islamic Republic of	342,653,571	1,134,438,328	1,477,091,899
Italy	222,847,152	1,134,438,328	1,357,285,480
Japan	5,325,367	1,134,438,328	1,139,763,695
Kenya	2,875,126,127	1,134,438,328	4,009,564,455
Korea	55,588,412	1,134,438,328	1,190,026,740
Kuwait	1,134,438,328	1,134,438,328	2,268,876,656

Gambar 2. Jumlah Alokasi SDR Tahun 2021
Sumber: *International Monetary Fund*, 2021

Berbeda dengan bantuan dana dari IMF sebelumnya, bantuan pinjaman dana ini tidak memiliki tenggat waktu pengembalian karena bantuan ini merupakan hasil persetujuan dari negara-negara anggota IMF. Dengan adanya bantuan tersebut, maka BI memperhitungkan bahwa cadangan devisa yang ada dapat untuk menunjang ketahanan zona eksternal serta melindungi stabilitas makro ekonomi keuangan Indonesia.

2. World Bank

World Bank merupakan sebuah organisasi pemerintah dalam bidang keuangan yang bertugas memberikan bantuan, pinjaman, ataupun hibah kepada negara - negara berkembang dan berpenghasilan menengah dan rendah untuk membantu meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun kesejahteraan yang merata. Selain itu, *World Bank* juga memberikan bantuan yang bersifat teknis dan saran kebijakan. *World Bank* dalam menjalankan tugasnya membawahi lima lembaga bank dunia, yaitu *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang berperan memberikan bantuan kepada negara menengah dan rendah berkredibel, *International Development Association* (IDA) yang berperan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada negara miskin, *The International Finance Corporation* (IFC) yang berperan memberikan pinjaman, ekuitas, dan bantuan teknis sebagai perangsang investasi swasta di negara berkembang, *The Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) yang berperan memberikan jaminan kerugian atas risiko non komersial kepada investor di negara berkembang, dan *The International Centre For Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang berperan memfasilitasi untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi. Hingga saat ini, *World Bank* telah diikuti oleh 189 negara anggota, yang juga dikenal sebagai investor atau pemegang saham dan salah satu negara tersebut yaitu Indonesia yang telah mengikuti *World Bank* sejak 13 April 1967.

Memberikan bantuan kepada negara berkembang atau anggotanya merupakan tujuan dari *World Bank*, terutama ketika negara tersebut mengalami krisis ekonomi. *World Bank* turut berperan penting dalam menangani krisis ekonomi akibat Covid-19 di Indonesia melalui beberapa program pendanaan, seperti:

- Program *Additional Financial for Social Assistance Reform* sebesar \$400 juta, merupakan proyek pendanaan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sistem perlindungan sosial pada saat pandemik Covid-19 dengan menyediakan perlindungan tepat waktu bagi masyarakat terdampak, termasuk dalam meningkatkan mutu perawatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Program *Covid-19 Supplemental Financing for Indonesia's First Financial Sector Reform Development Policy Loan* sebesar \$300 juta untuk proyek pendanaan peningkatan kedalaman, efisiensi, dan ketahanan di sektor keuangan pada saat pandemik Covid-19 dengan mendukung ekonomi riil dan berfokus pada perlindungan penduduk yang paling rentan dan memiliki risiko tertinggi.
- Program *Indonesia COVID-19 Emergency Response*, dengan memberikan dukungan dari lembaga *World Bank* sebesar \$250 juta untuk mendukung pengurangan risiko dalam hal pencegahan, pengujian, dan perawatan intensif termasuk meningkatkan fasilitas alat pelindung diri (APD), penguatan laboratorium dan sistem pengawasan, serta peningkatan protokol kesehatan.

3. Group of Twenty (G20)

Group of Twenty (G20) merupakan sebuah forum kerja sama internasional di bidang ekonomi yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 didirikan pada tahun 1999 sebagai respon terhadap kegagalan G7 dalam mengatasi permasalahan krisis ekonomi global yang sedang terjadi pada saat itu. Dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan dunia, G20 telah bertransformasi menjadi platform penting bagi dialog dan kolaborasi antara negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. G20 merepresentasikan sebesar $\frac{2}{3}$ populasi dunia, 80% perdagangan internasional, serta 90% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, sehingga G20 memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi global.

Melalui pertemuan tahunan, G20 membahas isu-isu penting seperti stabilitas keuangan, pembangunan berkelanjutan, dan reformasi lembaga keuangan internasional. Dalam konteks krisis ekonomi global, G20 terbukti efektif dalam menerapkan langkah-langkah strategis untuk

memulihkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong reformasi yang diperlukan dalam sistem keuangan global. Dengan pengaruhnya yang luas, G20 tidak hanya berperan dalam mengatasi masalah ekonomi tetapi juga dalam menciptakan kerja sama internasional yang lebih inklusif antara negara maju dan berkembang.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang tergabung dalam G20, mendapatkan kesempatan untuk menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022. Bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global, G20 yang diselenggarakan di Indonesia diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan mengangkat tema *'Recovery Together, Recovery Stronger'*, Indonesia berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan sektor perekonomian negara. Hal ini terbukti bahwa dengan adanya Presidensi G20, PDB Indonesia meningkat sebesar US\$533 juta atau kurang lebih senilai Rp7,6 Triliun. Sektor pariwisata di Indonesia juga menunjukkan peningkatan karena banyaknya wisatawan dari mancanegara yang datang, ditunjukkan dengan kenaikan ekonomi Indonesia senilai 1,8 juta hingga 3,6 juta. Meningkatnya ekonomi ini tentu saja memancing masuknya investor-investor untuk menanam saham ataupun modalnya ke Indonesia, sehingga memunculkan sekitar 600-700 ribu lapangan pekerjaan yang baru.

D. KESIMPULAN

Pandemi telah memicu kontraksi ekonomi global yang signifikan, memaksa negara-negara untuk mencari solusi bersama. Organisasi-organisasi internasional berperan sebagai katalisator dalam upaya pemulihan, memberikan bantuan keuangan, berbagi pengetahuan terkait penanganan yang tepat, dan memfasilitasi kerjasama antar negara untuk saling mendukung kebijakan satu sama lain.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak parah akibat pandemi telah mendapatkan dukungan signifikan dari lembaga-lembaga internasional, seperti *World Bank*, IMF, dan G20. Bantuan tersebut mencakup program pemulihan ekonomi, dukungan fiskal, dan transfer teknologi. Selain itu, Indonesia juga aktif terlibat dalam forum-forum internasional seperti G20, memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisi ekonomi global dan menarik investasi asing.

Namun, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam tata kelola ekonomi global, seperti ketidaksetaraan, dominasi negara maju, dan isu-isu keberlanjutan. Krisis ini telah menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem keuangan global dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi. Kerjasama internasional merupakan kunci untuk mengatasi krisis global yang kompleks. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, peran organisasi internasional dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain tidak dapat diabaikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Maharani, Y., & Marheni, M. (2022). "Strategi kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19: (studi kasus Indonesia)". *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17(02), 234-244.
- Setiyono, T. A., & Wicaksono, S. D. (2020). "Pengaruh pandemi covid-19 terhadap nilai tukar Rupiah". *Efektif Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 149-156.
- Siregar, R. W., Affianty, D., Hamka, H., & Usni, U. (2023). "Respons IMF (International Monetary Fund) Dalam Membantu Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi 2020-2021". *Jurnal Lanskap Politik*, 1(3), 155-178.
- Zubaidah, T., Yenriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021). "Krisis ekonomi bangsa Indonesia dimasa pandemi covid-19". *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 103-110.

Artikel Berita

BPS (2021). "Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 Persen (y-on-y)".

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1814/ekonomiindonesiatriwulan-iii-2021-tumbuh-3-51-persen--y-on-y-.html>

International Monetary Fund. (2021). "Indonesia: 2020 Article IV Consultation- Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia". *IMF Staff Country Reports* 16, no. 240 (2021): 1. <https://doi.org/10.5089/9781498373890.002>.

International Monetary Fund. (2021). "SDR Allocations for Member Country of IMF 2021 to Stabilize the Economy Due to the Pandemic". Retrieved from <https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDRAllocation#:~:text=A%20general%20allocation%20of%20Special,stability%20of%20the%20global%20economy>.

Kemnaker (2020). "Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 (April - Agustus 2020)". Retrieved from <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/55>.

World Bank Group. (2020). "Bank Dunia Menyetujui Pendanaan Tanggap Darurat COVID - 19 di Indonesia". Retrieved from <https://www.worldbank.org/in/news/pressrelease/2020/05/29/the-world-bankapproves-financing-for-indonesias-covid-19coronavirus-emergency-response>

World Bank Group. (2020). "Bank Dunia Setujui Pendanaan untuk Mendukung Sistem Bantuan Sosial dan Penanganan COVID-19 di Indonesia". Retrieved from <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/05/15/world-bankapproves-financing-to-support-indonesias-social-assistance-system-and-covid19coronavirus-response>

Situs Web

G20. 2008. "Declaration of the Summit on the Financial Market and the World Economy". 15 November 2008.

G20. 2008. "Report of the G20 Study Group on Global Credit Market Disruption". 31 October 2008.

G20. 2009. "Declaration on Strengthening the Financial System". 2 April 2009.

G20. 2009. "The Global Plan for Recovery and Reform". 2 April 2009.

IMF. 2009. "The State of Public Finances: Outlook and Medium Term Policies after the 2008 Crisis". 6 Maret 2009.